



Rancangan Akhir
RENCANA
KERJA
Tahun 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Probolinggo, Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



RACHEMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19731110 199302 2 002

DAFTAR ISI

Sampul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	54
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	56
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	91
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	93
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	99
3.3 Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	101
3.4 Program dan Kegiatan	102
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	120
BAB V PENUTUP	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Perangkat Daerah) PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 13, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Fungsi Renja sesuai dengan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

a. Tahap persiapan penyusunan,

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja , orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

b. Tahap penyusunan rancangan, dan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c. Tahap penetapan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja SKPD merupakan muatan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen RENJA ini merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan Surat Edaran Walikota Probolinggo Nomor 050/446/425.201/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- k. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- l. Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 ke dalam rencana kerja tahunan;
- b) Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program , kegiatan dan sub kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Tahun 2023;
- c) Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- 3.4. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

.Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, dan dua Unit Pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 sampai dengan 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Tabel dibawah ini mencantumkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Kota Probolinggo dengan pokok-pokok materi yang tersaji antara lain:

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d Tahun 2022
Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020 s.d 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2020 s.d 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (Tahun 2021)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Realisasi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 = (7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(kolom (5+7+9))</i>	<i>11=(kolom 10/9 x 100)</i>
110600.110601.01	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%								

110600.110601.01.001	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	85%	81%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	85%	81%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.01.002	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	85%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	85%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	85%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.01.003	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	85%	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.05	Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial								
110600.110601.05.001	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	40 Orang	40 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	160 Orang	96 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.05.002	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	50 Orang	45 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	170 Orang	125 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.05.003	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi dari LK3	50	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1300 Orang	1217 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana Berbasis Masyarakat	300	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	60%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

110600.110601.06	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial								
110600.110601.06.001	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Pengentasan Kemiskinan	36 Orang	35 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.06.002	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Persentase Kegiatan Verval yang terlaksana	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.06.003	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sosial	95 Orang	88 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.07	Pembinaan Lingkungan Sosial									
110600.110601.07.001	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi PMKS	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	30 Orang	30 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

110600.110601.07.002	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	35 Orang	35 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.07.003	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Masyarakat	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	15 Orang	15 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110600.110601.07.004	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	30 Orang	30 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120200.110601.01	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)								
120200.110601.01.001	Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas ekonomi	200 Orang	142 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga politik, organisasi wanita	2,60%	2,60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pembangunan	41%	41%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120200.110601.01.002	Pelebagaan Pengasutamaan Gender (PUG)	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	235	112	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120200.110601.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak								
		Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120200.110601.02.001	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani dan diselesaikan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan	25%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		perlindungan								
		Persentase jejaring yang berperan dlm penanganan permasalahan perempuan dan anak	25%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120200.110601.02.002	Pengarasutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak yang diinisiasi	20 Kelurahan dan Kecamatan	29 Kelurahan dan Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kampung Ramah Anak dan Forum Anak	25	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah PATBM	29	29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120200.110601.03	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan								
120200.110601.03.001	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan keterampilan	50 Orang	50 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121800.110601	Program Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan								

		Masyarakat								
121800.110601.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	225 Orang	88 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100,00	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100,00	100%	N/A	N/A	N/A

1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A	3	3	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A	2	4	200%	N/A	N/A	N/A
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persen dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persen Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persen Ban Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

		terpenuhi								
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persen kunjungan tamu yang terfasilitasi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persen Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik yang Terkoneksi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen jasa surat menyurat yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelira	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persen Gedung Kantor dan Lainnya yang terpelira	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	0,40	0,40	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	0,40	0,40	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran dari orsos yang mendapatkan upaya-upaya pemberdayaan sosial	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan advokasi LK3	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	50	65	130%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A

1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	224	177	79%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	120	170	142%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas, Pemulung dan fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A

1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.6.5.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	270	292	108%	N/A	N/A	N/A
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan verval yang terlaksana	N/A	N/A	100	98	98%	N/A	N/A	N/A
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan	N/A	N/A	202	114	56%	N/A	N/A	N/A

1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah sasaran yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	N/A	N/A	440	322	73%	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan Sosial	N/A	N/A	0,49	0,41	84%	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana berbasis	N/A	N/A	200	50	25%	N/A	N/A	N/A

		Masyarakat serta Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	0,40	0,40	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	0,40	0,40	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	N/A	N/A	3	3	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	N/A	N/A	2	2	100%	N/A	N/A	N/A

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	49,00	29,53	60%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	49,00	29,53	60%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	N/A	N/A	6	6	100%	N/A	N/A	N/A

2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	N/A	N/A	2	2	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	N/A	N/A	250	386	154%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	49,00	29,53	60%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	N/A	N/A	41	29	71%	N/A	N/A	N/A
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan	N/A	N/A	100	96	96%	N/A	N/A	N/A
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	25	33	130%	N/A	N/A	N/A
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A

		Gender (PUG)								
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	49	29,53	60%	N/A	N/A	N/A
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	49	29,53	60%	N/A	N/A	N/A
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	N/A	N/A	28	20	71%	N/A	N/A	N/A

2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	N/A	N/A	40	0	0%	N/A	N/A	N/A
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota layak anak	N/A	N/A	30	30	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian indikator Kota layak anak	N/A	N/A	30	30	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak	N/A	N/A	25	20	80%	N/A	N/A	N/A
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak yang diinisiasi	N/A	N/A	5	5	100%	N/A	N/A	N/A
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan	N/A	N/A	25	0	0%	N/A	N/A	N/A
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan forum anak	N/A	N/A	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	N/A	N/A	29	0	0%	N/A	N/A	N/A

2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	90	90,00	100%	N/A	N/A	N/A
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	90	90,00	100%	N/A	N/A	N/A
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A	225	225,00	100%	N/A	N/A	N/A

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	100%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah realisasi Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154	154	100%
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	100%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	100%
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terkoneksi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah realisasi Meubel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	100%
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	100%
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

	Kabupaten/Kota	peningkatan kemampuan								
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Presentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	100%
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	100%
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%

1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Penyediaan Permakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154	154	100%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28	28	100%
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	100%

		Napza di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Penyediaan Sandang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	100%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800	800	100%
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	283	283	100%

		yang difasilitasi								
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	127	127	100%
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	80,00	100%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	200	100%
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	100%
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00	90,00	100%

1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luasan sarana dan prasarana TMP yang direhabilitasi/pengecatan pagar dan taman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	100%
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan upacara Hari Kemerdekaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	100%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	100%

2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	100%
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	100%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	100%
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,00	5,00	100%
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	100%

2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dan mendapatkan pendampingan dalam organisasi wanita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang menerima peningkatan kapasitas tentang perlindungan perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	240	240	100%
2.08.03.2.01.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%

2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2TP2A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	160	160	100%
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Jejaring yang menangani, mengawasi, dan melindungi kasus kekerasan pada perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41	41	100%
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jejaring yang berperan dalam Penanganan Permasalahan Perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	180	180	100%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	100%
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	100%
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	9	100%
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%

2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	100%
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	100%
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29	29	100%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	100%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	100%
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	100%

2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam rangka hari anak nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100%
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah PATBM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34	34	100%
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota tim pos cinta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	100%
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Persentase Pencegahan Dini Kasus Kekerasan Terhadap Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

	Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang tertangani dan terselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	100%
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Anak yang mendapatkan Perlindungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	100%

2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang menangani Kasus Kekerasan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	100%
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	100%

2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	100%
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo tidak terlepas dari Undang - undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman pada pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.

Untuk urusan Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD yang merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	70	75	75	75	74,44%	74,44%	75	75	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh	100	75	78	78	78	77,42%	77,42%	78	78	

	ar diluar panti	rehabilitasi sosial di luar panti										
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	80	81	81	81	80,95%	80,95%	81	81	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	85	89	89	89	88,77%	88,77%	89	89	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	95	100	100	100	98,29%	98,29%	100	100	

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
	Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	31,17	31,03	29,43	27,79	26,63	24,85
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,76	68,55	68,95	69,35	69,75	70,15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasar data akhir tahun 2021 Jumlah PMKS di kota Probolinggo terdapat 2555 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi diantaranya: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, .keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan

Perlu dipahami bahwa dalam penanganan PMKS, didapatkan kondisi bahwa tidak semua PMKS dapat menikmati hasil pembangunan dan hidup secara layak, berkualitas serta bermartabat. Masih banyak masyarakat dalam rentang perjalanan kehidupannya mengalami kesulitan, hambatan dan permasalahan yang menghambat keberfungsian sosialnya secara layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri.

Disisi lain, penanganan PMKS belum terlaksana secara optimal dan telah menjadi isu bersama baik permasalahan internal maupun eksternal dari PMKS itu sendiri. Faktor internal yang dirasakan PMKS adalah ketidakberdayaannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemanfaatan dalam mengakses sistem-sistem sumber yang ada secara normatif. Sedangkan faktor eksternal adalah masih rendahnya pemahaman

masyarakat dan belum optimal pemerintah dalam penanganan permasalahan PMKS yang berada di masyarakat. Hal itu dikarenakan sbb:

- 1) Rendahnya sinergisitas penyelenggaraan pelayanan sosial baik melalui lembaga pelayanan sosial pemerintah maupun bukan pemerintah / swasta.
 - 2) Organisasi/Tim bekerja sendiri sendiri sesuai dengan kewenangan atau bidangnya masing-masing.
 - 3) Pemahaman bahwa masalah sosial ini merupakan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 4) Berdasarkan data per desember 2021 jumlah masyarakat miskin kota probolinggo mencapai 116.013 jiwa, masyarakat miskin ini ditandai dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif.
 - 5) Dukungan kualitas SDM pada bidang pengampu urusan sosial kurang.
- b. Masih Banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Isu –isu yang perlu ditangani dalam konteks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota probolinggo yaitu:

- 1) Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Berdasarkan data tahun 2021 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan data tahun 2020 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah kasus Anak
2020	31	21
2021	27	20

- 2) Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak

dioperasionalkan. Dibutuhkannya semacam panduan pelaksanaan akan membantu unit organisasi untuk menerapkan PUG di masing-masing sub sektornya.

3. Kebijakan pelaksanaan urusan masih banyak yang netral gender. Hal ini disebabkan oleh karena perspektif gender belum terintegrasikan pada regulasi
4. keterbatasan SDM PPPA yang sensitif dan responsif gender. Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM PPPA belum didukung dengan sistem training yang memadai, seperti adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik PPPA. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat kelurahan dan pemanfaat. Masih dibutuhkannya Penyuluh yang mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluh akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.
5. Anggaran responsif gender (ARG) belum menysasar pada indikator kinerja pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasikan dengan kinerja Kota. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.
6. Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis gender. Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. Belum adanya KKP sudah ada panduan data terpilah dan telah dipedomani sehingga data terpilah sudah ada di masing-masing perangkat daerah. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang ter-update secara reguler. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis gender.
7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender. Hal ini disebabkan oleh karena analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan

penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.

8. Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan di kelurahan. Hal ini disebabkan oleh karena perempuan belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan belum menjadi bagian penting dalam organisasi masyarakat, sehingga kurang memberi kepastian dalam mendapatkan akses terhadap pembangunan. Tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan kebutuhan perempuan tidak muncul sebagai masalah yang harus diselesaikan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sangat berbeda jauh dibandingkan dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat adalah perubahan indikator kinerja, target, dan satuan pada rancangan akhir renja. Perubahan indikator kinerja, target dan satuan ini sesuai dengan Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dalam keputusan ini sudah ditetapkan Indikator Kinerja sampai dengan target dan satuan pada masing-masing Sub Kegiatan. Berdasarkan keputusan tersebut juga terdapat sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD. Perubahan ini dilakukan setelah melakukan beberapa rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait selain itu sudah dilaksanakan desk bersama Inspektorat, Bagian organisasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Probolinggo

Nama Prangkat Daerah: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan 2023	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan 2023	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Penting
			kinerja	capaian	indikatif			kinerja	capaian	indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	urusan PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kota Probolinggo			10.752.845.096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.265.773.342	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Probolinggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100	5.584.145.696	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Kota Probolinggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100 Persen	6.399.839.842	

						KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	92.074.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Persen	76.426.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	5	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	4	77.074.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	61.426.900	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	4.572.183.284	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.375.658.792	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	100	4.395.439.284	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	5.222.388.292	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100	124.444.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	82.908.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4	52.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	70.362.500	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	6.130.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	6.129.800	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	4	6.130.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.129.800	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100	160.763.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	192.617.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Persentase dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100	160.763.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	192.617.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	268.918.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	276.559.250	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Persentase realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100	27.141.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.647.250	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	50	4.706.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.270.800	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100	7.396.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.215.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	5	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.998.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	3.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	7.000.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100	171.374.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	179.318.200	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terkoneksi	100	53.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	48.110.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100	57.347.187	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 Persen	38.119.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya	2	57.347.187	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.119.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100	176.982.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 Persen	149.964.030	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	100	6.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.854.030	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100	108.020.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	103.280.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100	37.137.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.830.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100	25.075.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	249.747.225	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	284.365.070	

			Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak	100	24.364.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.200.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100	110.382.925	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	117.560.970	
						Pemeliharaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	30.164.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	39.937.500	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	69.502.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	85	1.638.096.228	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	80 Persen	74.137.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80	735.298.114	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80 Persen	74.137.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	166	735.298.114	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	29 Orang	7.921.000	

-	-	-	-	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	5 Orang	61.316.000	
-	-	-	-	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	43 Lembaga	3.400.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Presentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	35	167.500.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	1.500.000	

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85	1.002.798.114	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85 Persen	1.039.380.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	902.798.114	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	845.242.000	

Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Penyediaan Permakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	166	735.298.114	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	146 Orang	783.242.000
Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	35	167.500.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	62.000.000

		Sosial								
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	100.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	194.138.000	

Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	80	10.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	19.800.000
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Penyediaan Sandang	100	90.000.000	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	174.338.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80	393.070.656	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	30 Persen	458.864.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	50	393.070.656	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	50 Persen	458.864.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Data yang dikelola	800	169.070.656	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	800 Orang	325.524.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	295	117.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	52.750.000	

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	130	107.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117 Orang	80.590.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	80	536.316.713	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	80 Persen	201.900.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	80	536.316.713	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	80 Persen	201.900.000	

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	200	536.316.713	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	201.900.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Probolinggo	Presentase TMP yang terkelola	85	100.607.370	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Probolinggo	Presentase TMP yang terkelola	85 Persen	91.652.500	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	90	100.607.370	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	90 Persen	91.652.500	
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Luasan sarana dan prasarana TMP yang direhabilitasi/pengecatan pagar dan taman	10	12.000.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1	17.500.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	70 Makam	15.187.000	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan upacara Hari Kemerdekaan	90	71.107.370	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 Laporan	61.465.500	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				687.918.000	

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	51	239.864.247	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	51 Persen	417.631.000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55	65.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	45.620.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	55	45.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	29.157.500

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Probolinggo	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	60	20.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Probolinggo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	16.462.500
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6	174.864.247	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	372.011.000

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	50	40.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.620.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dan mendapatkan pendampingan dalam organisasi wanita	100	134.864.247	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisasi	340.391.000	

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	100	767.194.679	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	100 Persen	43.150.000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	278.464.893	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100 Persen	24.000.000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2TP2A	5	24.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 Orang	24.000.000	

<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan</p>	<p>100</p>	<p>254.464.893</p>	<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan</p>	<p>100 Persen</p>	<p>19.150.000</p>
<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Jumlah SDM Jejaring yang menangani, mengawasi, dan melindungi kasus kekerasan pada perempuan</p>	<p>41</p>	<p>20.200.000</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</p>	<p>41 Orang</p>	<p>19.150.000</p>

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30	234.264.893	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30 Persen	5.750.000	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30	234.264.893	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30 Persen	5.750.000	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	1	3.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.750.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	80	231.264.893	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	80 Persen	200.942.000	

	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70	85.000.000	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70 Persen	107.450.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah kampung ramah anak	27	30.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27 Organisasi	18.850.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Forum Anak	35	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	35 Dokumen	88.600.000	

							Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	80	146.264.893	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	80 Persen	93.492.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	29	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Dokumen	39.500.000

Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam rangka hari anak nasional	3	26.264.893	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4.250.000	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah PATBM	34	70.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	49.742.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Probolinggo	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	100	6.950.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Probolinggo	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	100 Persen	20.445.000	

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	6.950.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	20.445.000	
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah petugas Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	80	6.950.000	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.445.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.100.000	

<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>90</p>	<p>18.271.607</p>	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>90 Persen</p>	<p>3.100.000</p>
<p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>90</p>	<p>18.271.607</p>	<p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kota Probolinggo</p>	<p>Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>90 Persen</p>	<p>3.100.000</p>

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	15	18.271.607	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	3.100.000
--	-------------------------	---	----	------------	--	------------------	---	-----------	-----------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Probolinggo membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada akhir tahun 2021, ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Program/Kegiatan Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	30 Persen	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verwal	50 Persen	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Usulan Musrenbang
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Usulan Musrenbang 16 Orang dan Usulan Pokok Pikiran 1 Orang
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85 Persen	

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	146 Orang	Usulan Musrenbang 136 Orang dan Usulan Pokok Pikiran 10 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Usulan Musrenbang 21 Orang dan Usulan Pokok Pikiran 4 Orang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“ TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak - anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak(interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas - tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk - bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Tahun Keempat dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023 yaitu “PERCEPATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN KOTA PROBOLINGGO YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”. Tema dimaksud menitikberatkan pada usaha pemulihan ekonomi kota pasca terpuruk akibat pandemic Covid-19 pada Tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 berkontraksi hingga -3,64% dan pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,06%, belum sepenuhnya pulih seperti sebelum adanya pandemi yang berada pada kisaran diatas 5%. Fokus tema pembangunan tahunan dibidang ekonomi dimaksud selaras dengan pencapaian Misi Pembangunan Daerah kesatu sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial.

Berdasarkan hasil sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan terhadap RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dimaksud, maka telah ditetapkan penyesuaian terhadap Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagai berikut : “PERCEPATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”. Penyesuaian tema ini selain mengakomodir kebutuhan penyesuaian tema dan kebijakan pembangunan dari Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang berfokus pada pemulihan ekonomi, juga terdapat penambahan fokus pembangunan terkait peningkatan kualitas SDM sebagai tindak lanjut hasil penyesuaian terhadap Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga mengacu

pada usaha peningkatan kesejahteraan sosial dari kebutuhan pengentasan kemiskinan yang juga terdampak akibat Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020.

3.1.1 Telaah Renstra K/L

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengacu pada dua telaah Kementrian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Telaah sasarannya adalah sebagai berikut

Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sedangkan Telaah di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. *Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;

b. *Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. *Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekatan telaah kedua kementerian, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota probolinggo mengambil Program kerja dari keduanya untuk diturunkan dan di sesuaikan sebagai acuan berikut :

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverifikasi sesuai data Usulan	kabupaten tidak Dapat mengintervensi keputusan verifikasi pusat	koordinasi dan Personil pendukung data serta system pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti Sendiri	Kerjasama Terkait Rehabilitasi
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok-kelompok usaha Bersama
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang Diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika Harus disesuaikan	Adanya petugas updating data sampai dengan Kecamatan

Kementerian PPPA			
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayaan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang Dilatih	Pengoptimalan forum gender di Opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang belum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat;
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak;

Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tercantum pada tabel dibawah ini:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Persentase PMKS (Penurunan)	62.4	33.5
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	91.62%	89%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.05	68.40
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	N/A	Utama
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	N/A	100%
			Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Utama

Adapun tujuan dan sasaran Dinas sosial mengacu pada RPJMD dapat di jelaskan dengan cascading sebagai berikut:



3.3. Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terdapat 5 (lima) Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan, diantaranya ialah:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Penetapan target SPM Kota Probolinggo Tahun 2023 dimaksud mengacu pada indikator SPM yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang dibedakan berdasarkan Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal Layanan Dasar. Selain itu juga mempertimbangkan Capaian Indikator SPM untuk Tahun 2021 walaupun terdapat perbedaan beberapa indikator SPM mengingat untuk Tahun 2021 indikator mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Perbandingan target nasional juga dijadikan acuan untuk penetapan target daerah mengingat pelaksanaan indikator diarahkan untuk mendukung pencapaian target nasional disamping asas kewajaran pencapaian target dari capaian tahun sebelumnya.

Urusan Sosial dari 5 indikator SPM terdapat 1 (satu) indikator yang ditetapkan berdasarkan target nasional yaitu korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya ditetapkan dengan mengacu pada capaian indikator tahun 2021 mengingat kesulitan untuk memberikan layanan terhadap seluruh PSKS melalui rehabilitasi sosial diluar panti dengan pertimbangan keterbatasan anggaran dan kemampuan daerah dalam memberikan cakupan layanan.

Adapun penetapan target SPM pada Urusan Sosial sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 6. 8 Target Indikator SPM Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018		INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021						KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2021	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
				INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2023	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOSIAL										
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	74.44%	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	75%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	77.42%	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	78%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	80.95%	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	81%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	88.77%	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	89%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	98.29%	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	

3.4. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 dengan tema Percepatan Produktivitas sektor Unggulan Kota Probolinggo yang mendukung pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan mengacu pada dua prioritas, antara lain yang prioritas pertama Pemantapan Kualitas

sumber daya manusia yang berorientasi pada pasar tenaga kerja yang memiliki arah kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak berbasis peran serta masyarakat; Prioritas kedua yaitu Penguatan Jaminan Sosial untuk masyarakat kelompok rentan dan pelestarian kebudayaan dengan arah kebijakan meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial, serta penurunan angka kemiskinan berbasis validitas data yang akurat dan dinamis dan arah kebijakan keduanya, mewujudkan penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penanganan terpadu dan multi sektor.

Pemerintah Kota Probolinggo juga memiliki 21 prioritas daerah pada tahun 2023 namun pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo hanya mengampu satu prioritas daerah yaitu Biaya Operasional Relawan. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki mitra kerja atau relawan dalam membantu tugas pokok dan fungsi dinas. Adapun relawan atau mitra kerja yang dimiliki meliputi:

- a. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sejumlah 34 Anggota;
- b. SDM Program Keluarga Harapan sejumlah 34 Orang;
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sejumlah 5 Orang;
- d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sejumlah 29 Orang;
- e. Fasilitator SLRT sejumlah 37 Orang

Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terbagi Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Tahun 2023	tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.265.773.342				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	Kota Probolinggo	100 Persen	6.399.839.842	DAU		100 Persen	6.399.839.842
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolinggo	100 Persen	76.426.900	DAU		100 Persen	76.426.900
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	5 Dokumen	15.000.000	DAU		5 Dokumen	15.000.000

1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	61.426.900	DAU		4 Laporan	61.426.900
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	5.375.658.792	DAU		100 Persen	5.375.658.792
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	42 Orang/Bulan	5.222.388.292	DAU		42 Orang/Bulan	5.222.388.292
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	700 Dokumen	82.908.000	DAU		700 Dokumen	82.908.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	70.362.500	DAU		4 Laporan	70.362.500
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	6.129.800	DAU		100 Persen	6.129.800
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	1 Laporan	6.129.800	DAU		1 Laporan	6.129.800

1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	192.617.000	DAU		100 Persen	192.617.000
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	2 Dokumen	192.617.000	DAU		2 Dokumen	192.617.000
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	276.559.250	DAU		100 Persen	276.559.250
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	27.647.250	DAU		4 Paket	27.647.250
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	4.270.800	DAU		4 Paket	4.270.800
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	8.215.000	DAU		4 Paket	8.215.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Dokumen	1.998.000	DAU		12 Dokumen	1.998.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	6 Laporan	7.000.000	DAU		6 Laporan	7.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	24 Laporan	179.318.200	DAU		24 Laporan	179.318.200

1.06.01.2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	11 Dokumen	48.110.000	DAU		11 Dokumen	48.110.000
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100 Persen	38.119.000	DAU		100 Persen	38.119.000
1.06.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolinggo	5 Unit	38.119.000	DAU		5 Unit	38.119.000
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Kota Probolinggo	100 Persen	149.964.030	DAU		100 Persen	149.964.030
1.06.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	4 Laporan	6.854.030	DAU		4 Laporan	6.854.030
1.06.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	11 Laporan	103.280.000	DAU		11 Laporan	103.280.000
1.06.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	1 Laporan	15.830.000	DAU		1 Laporan	15.830.000
1.06.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Laporan	24.000.000	DAU		12 Laporan	24.000.000

1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	100 Persen	284.365.070	DAU		100 Persen	284.365.070
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolinggo	1 Unit	27.200.600	DAU		1 Unit	27.200.600
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Probolinggo	29 Unit	117.560.970	DAU		29 Unit	117.560.970
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Probolinggo	4 Unit	30.164.000	DAU		4 Unit	30.164.000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	82 Unit	39.937.500	DAU		82 Unit	39.937.500
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolinggo	4 Unit	69.502.000	DAU		4 Unit	69.502.000
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Kota Probolinggo	80 Persen	74.137.000	DAU		80 Persen	74.137.000
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	80 Persen	74.137.000	DAU		80 Persen	74.137.000

1.06.02.2.03.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Kota Probolinggo	29 Orang	7.921.000	DAU		29 Orang	7.921.000
1.06.02.2.03.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	5 Orang	61.316.000	DAU		5 Orang	61.316.000
1.06.02.2.03.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	43 Lembaga	3.400.000	DAU		43 Lembaga	3.400.000
1.06.02.2.03.0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	5 Sertifikat	1.500.000	DAU		5 Sertifikat	1.500.000
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo	85 Persen	1.039.380.000	DAU		85 Persen	1.039.380.000

1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Probolinggo	80 Persen	845.242.000	DAU		80 Persen	845.242.000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	146 Orang	783.242.000	DAU		146 Orang	783.242.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	25 Orang	62.000.000	DAU		25 Orang	62.000.000
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Probolinggo	80 Persen	194.138.000	DAU		80 Persen	194.138.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	80 Orang	19.800.000	DAU		80 Orang	19.800.000

1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	174.338.000	DAU		100 Orang	174.338.000
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Probolinggo	30 Persen	458.864.000	DAU		30 Persen	458.864.000
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	Kota Probolinggo	50 Persen	458.864.000	DAU		50 Persen	458.864.000
1.06.05.2.02.02	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Kota Probolinggo	800 Orang	325.524.000	DAU		800 Orang	325.524.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	150 Orang	52.750.000	DAU		150 Orang	52.750.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	117 Orang	80.590.000	DAU		117 Orang	80.590.000
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	Kota Probolinggo	80 Persen	201.900.000	DAU		80 Persen	201.900.000

1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	80 Persen	201.900.000	DAU		80 Persen	201.900.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	225 Orang	201.900.000	DAU		225 Orang	201.900.000
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	Kota Probolinggo	85 Persen	91.652.500	DAU		85 Persen	91.652.500
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	90 Persen	91.652.500	DAU		90 Persen	91.652.500
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	70 Makam	15.187.000	DAU		70 Makam	15.187.000
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	36 Laporan	61.465.500	DAU		36 Laporan	61.465.500

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DAU			
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				687.918.000	DAU			687.918.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kota Probolinggo	51 Persen	417.631.000	DAU		51 Persen	417.631.000
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Kota Probolinggo	55 Persen	45.620.000	DAU		55 Persen	45.620.000
2.08.02.2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	55 Dokumen	29.157.500	DAU		55 Dokumen	29.157.500

2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	60 Perangkat Daerah	16.462.500	DAU		60 Perangkat Daerah	16.462.500
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Probolinggo	6 Persen	372.011.000	DAU		6 Persen	372.011.000
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	31.620.000	DAU		2 Dokumen	31.620.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	23 Organisasi	340.391.000	DAU		23 Organisasi	340.391.000

2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	Kota Probolinggo	100 Persen	43.150.000	DAU		100 Persen	43.150.000
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Kota Probolinggo	100 Persen	24.000.000	DAU		100 Persen	24.000.000
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Probolinggo	24 Orang	24.000.000	DAU		24 Orang	24.000.000
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	Kota Probolinggo	100 Persen	19.150.000	DAU		100 Persen	19.150.000
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Probolinggo	41 Orang	19.150.000	DAU		41 Orang	19.150.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	Persentase data gender dan anak yang terpilah	Kota Probolinggo	30 Persen	5.750.000	DAU		30 Persen	5.750.000

	ANAK								
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	Kota Probolinggo	30 Persen	5.750.000	DAU		30 Persen	5.750.000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	5.750.000	DAU		1 Dokumen	5.750.000
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	Kota Probolinggo	80 Persen	200.942.000	DAU		80 Persen	200.942.000
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	Kota Probolinggo	70 Persen	107.450.000	DAU		70 Persen	107.450.000
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Probolinggo	27 Organisasi	18.850.000	DAU		27 Organisasi	18.850.000

2.08.06.2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	35 Dokumen	88.600.000	DAU		35 Dokumen	88.600.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	Kota Probolinggo	80 Persen	93.492.000	DAU		80 Persen	93.492.000
2.08.06.2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	29 Dokumem	39.500.000	DAU		29 Dokumem	39.500.000
2.08.06.2.02.0 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	3 Dokumen	4.250.000	DAU		3 Dokumen	4.250.000
2.08.06.2.02.0 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	34 Dokumen	49.742.000	DAU		34 Dokumen	49.742.000

2.08.07.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	Kota Probolinggo	100 Persen	20.445.000	DAU		100 Persen	20.445.000
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Probolinggo	100 Persen	20.445.000	DAU		100 Persen	20.445.000
2.08.07.2.02.04	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	5 Dokumen	20.445.000	DAU		5 Dokumen	20.445.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.100.000	DAU			3.100.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Kota Probolinggo	90 Persen	3.100.000	DAU		90 Persen	3.100.000

2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	Kota Probolinggo	90 Persen	3.100.000	DAU		90 Persen	3.100.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	1 Laporan	3.100.000	DAU		1 Laporan	3.100.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 :

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran	Sumber Dana
		Tolak Ukur	Target Kinerja		
1	2	3	5	6	7
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.265.773. 342	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100 Persen	6.399.839. 842	DAU
1.06.01.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Persen	76.426.90 0	DAU
1.06.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.000.00 0	DAU
1.06.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	61.426.90 0	DAU
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.375.658. 792	DAU
1.06.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/B ulan	5.222.388. 292	DAU
1.06.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	82.908.00 0	DAU
1.06.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	70.362.50 0	DAU

		Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD			
1.06.01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	6.129.800	DAU
1.06.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.129.800	DAU
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	192.617.0 00	DAU
1.06.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokume n	192.617.0 00	DAU
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	276.559.2 50	DAU
1.06.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.647.25 0	DAU
1.06.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.270.800	DAU
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.215.000	DAU
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	1.998.000	DAU
1.06.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	7.000.000	DAU
1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	179.318.2 00	DAU
1.06.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokume n	48.110.00 0	DAU
1.06.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 Persen	38.119.00 0	DAU
1.06.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.119.00 0	DAU

1.06.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 Persen	149.964.030	DAU
1.06.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.854.030	DAU
1.06.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	103.280.000	DAU
1.06.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.830.000	DAU
1.06.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	DAU
1.06.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	284.365.070	DAU
1.06.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.200.600	DAU
1.06.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	117.560.970	DAU
1.06.01.2.0 9.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	30.164.000	DAU
1.06.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	39.937.500	DAU
1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	69.502.000	DAU
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	80 Persen	74.137.000	DAU
1.06.02.2.0 3.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80 Persen	74.137.000	DAU
1.06.02.2.0 3.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	29 Orang	7.921.000	DAU

	Kabupaten/Kota	Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota			
1.06.02.2.0 3.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	5 Orang	61.316.000	DAU
1.06.02.2.0 3.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	43 Lembaga	3.400.000	DAU
1.06.02.2.0 3.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	1.500.000	DAU
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85 Persen	1.039.380.000	DAU
1.06.04.2.0 1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	845.242.000	DAU
1.06.04.2.0 1.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	146 Orang	783.242.000	DAU
1.06.04.2.0 1.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	62.000.000	DAU
1.06.04.2.0 2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	80 Persen	194.138.000	DAU

		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
1.06.04.2.0 2.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	19.800.000	DAU
1.06.04.2.0 2.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	174.338.000	DAU
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	30 Persen	458.864.000	DAU
1.06.05.2.0 2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	50 Persen	458.864.000	DAU
1.06.05.2.0 2.02	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	800 Orang	325.524.000	DAU
1.06.05.2.0 2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	52.750.000	DAU
1.06.05.2.0 2.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117 Orang	80.590.000	DAU
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	80 Persen	201.900.000	DAU
1.06.06.2.0 2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	80 Persen	201.900.000	DAU
1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	225 Orang	201.900.000	DAU

		Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	85 Persen	91.652.500	DAU
1.06.07.2.0 1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	90 Persen	91.652.500	DAU
1.06.07.2.0 1.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	DAU
1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	70 Makam	15.187.000	DAU
1.06.07.2.0 1.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 Laporan	61.465.500	DAU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				DAU
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			687.918.000	DAU
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	51 Persen	417.631.000	DAU
2.08.02.2.0 1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	45.620.000	DAU
2.08.02.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	29.157.500	DAU

2.08.02.2.0 1.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangka t Daerah	16.462.50 0	DAU
2.08.02.2.0 2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	372.011.0 00	DAU
2.08.02.2.0 2.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokume n	31.620.00 0	DAU
2.08.02.2.0 2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisa si	340.391.0 00	DAU
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	100 Persen	43.150.00 0	DAU
2.08.03.2.0 2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100 Persen	24.000.00 0	DAU
2.08.03.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 Orang	24.000.00 0	DAU
2.08.03.2.0 3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus	100 Persen	19.150.00 0	DAU

		perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan			
2.08.03.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41 Orang	19.150.000	DAU
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30 Persen	5.750.000	DAU
2.08.05.2.0 1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30 Persen	5.750.000	DAU
2.08.05.2.0 1.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.750.000	DAU
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	80 Persen	200.942.000	DAU
2.08.06.2.0 1.	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70 Persen	107.450.000	DAU
2.08.06.2.0 1.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27 Organisasi	18.850.000	DAU
2.08.06.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	88.600.000	DAU
2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	80 Persen	93.492.000	DAU

	Kabupaten / Kota				
2.08.06.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Dokumen	39.500.000	DAU
2.08.06.2.0 2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4.250.000	DAU
2.08.06.2.0 2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	49.742.000	DAU
2.08.07.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	100 Persen	20.445.000	DAU
2.08.07.2.0 2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	20.445.000	DAU
2.08.07.2.0 2.04	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.445.000	DAU
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.100.000	DAU
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Persen	3.100.000	DAU

2.13.05.2.0 1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Persen	3.100.000	DAU
2.13.05.2.0 1.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	3.100.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat Rancangan Akhir Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana kerja ini juga secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Probolinggo, Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19731110 199302 2 002